

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa transportasi atau angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Sedangkan lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, dan sebagainya. Salah satu prasarana menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 adalah halte yang merupakan tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Sebagai salah satu fasilitas publik, eksistensi sarana pendukung seperti halte seharusnya dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna sesuai pedomannya.

Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari 17 kecamatan dan 10 kelurahan, dan 167 desa. Adapaun sarana transportasi yang terdapat di Kabupaten Minahasa Selatan adalah Angkutan Perkotaan yang terdiri dari 2 trayek, dan Angkutan Pedesaan yang terdiri dari 24 trayek. Sedangkan prasarananya adalah terminal dan halte. Pada saat ini, halte yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan belum berperan sesuai dengan fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penumpang angkutan umum yang tidak menggunakan halte sesuai dengan fungsinya. Berdasarkan hasil survei inventarisasi prasarana angkutan umum yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan terdapat 3 halte dimana hanya 2 halte yang dikaji dalam penelitian ini karena 2 halte tersebut dilewati trayek angkutan perkotaan. Jarak antar halte tersebut sangat berjauhan yaitu 15 km. Dari dua halte yang ada, semuanya belum memenuhi standar seperti kondisi kanopi yang rusak, tidak ada rambu petunjuk, papan informasi trayek,

pagar maupun papan pengumuman dan jarak antar halte tersebut sangat berjauhan. Selain itu kurangnya keberadaan halte pada titik-titik kantong penumpang, untuk melayani naik dan turun penumpang di sepanjang jalur trayek angkutan umum, sehingga pengguna angkutan umum lebih sering menunggu di tepi jalan.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi fasilitas halte, penentuan jumlah kebutuhan halte, dan mendesain halte baru agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para penggunanya sesuai dengan fungsinya yaitu menaikkan dan menurunkan penumpang. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam penyusunan kertas kerja wajib ini, penulis mengambil judul **"EVALUASI KEBUTUHAN HALTE ANGKUTAN PERKOTAAN DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Kurangnya halte angkutan perkotaan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Jarak antara 1 halte dengan halte yang lain sangat berjauhan 15 km.
3. Halte yang ada tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan utama yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi halte angkutan perkotaan di Kabupaten Minahasa Selatan?
2. Bagaimana cara menentukan kebutuhan halte serta penentuan lokasi halte sesuai dengan standar yang berlaku agar menjadi tempat naik turunnya penumpang yang tertib, aman, dan nyaman?
3. Bagaimana desain halte yang sesuai dengan pedoman teknis sehingga dapat meningkatkan nilai fungsi halte dan memenuhi kebutuhan penumpang?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis kebutuhan halte evaluasi fasilitas halte saat ini di wilayah studi angkutan perkotaan di Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan pedoman teknis yang bertujuan untuk memudahkan pengguna angkutan umum agar berfungsi sebagai tempat naik dan turunnya penumpang.

1. Mengidentifikasi kondisi fasilitas halte saat ini di wilayah studi.
2. Mengetahui kebutuhan halte sesuai dengan standar di wilayah kajian dan tata guna lahan serta penataan titik lokasi halte pada wilayah studi.
3. Memberikan usulan desain fasilitas halte.

1.5 Batasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian diperlukan arah yang jelas terkait permasalahan yang akan dikaji, oleh karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga maka penulisan ini hanya menjelaskan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan yang dilewati trayek angkutan perkotaan di Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Perhitungan hanya dilakukan untuk penentuan jumlah kebutuhan halte dan titik rencana lokasi halte di Kabupaten Minahasa Selatan.
3. Usulan desain fasilitas halte berdasarkan standar teknis fasilitas tempat henti angkutan umum hanya untuk angkutan perkotaan dan tidak melakukan analisis biaya.